



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEPARTEMEN KESEHATAN,  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK, DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Persidangan	: I
Jenis	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Selasa, 10 November 2009
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Melanjutkan acara rapat tanggal 9 November 2009
Anggota yang hadir	: 43 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang anggota ijin.

**I. PENDAHULUAN**

Skors Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dicabut dan dibuka kembali pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI, pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Setelah mendengarkan pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari Menteri Kesehatan RI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program kesehatan
2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menjalankan UU SJSN No. 40 Tahun 2004 dengan segera membentuk UU BPJSN paling lambat 2010 agar seluruh Warga Negara Indonesia bukan hanya orang miskin mendapatkan hak mereka akan pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu rapat kerja gabungan antara Komisi IX DPR RI dengan Departemen Kesehatan RI, Depnakertrans, DJSN, dan Kementerian BUMN.

3. Komisi IX DPR RI membentuk Panja terkait kerjasama riset biomedis dengan internasional, proteksi sample dan strain suatu penyakit termasuk virus hasil penelitian di Indonesia yang akan menghasilkan landasan-landasan untuk kerjasama di bidang kesehatan dengan pihak asing dimasa mendatang agar pengawasan jelas, mengutamakan kepentingan bangsa serta jelas keuntungannya bagi Indonesia.
4. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk merealisasikan program-program untuk mencapai target Millenium Development Goals pada tahun 2015 dan menetapkan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk menyiapkan peraturan-peraturan untuk mengimplementasikan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Rumah Sakit 2009.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).
7. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk segera melakukan pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan.
8. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk memprioritaskan kesehatan jiwa, penyediaan air bersih, penanganan gizi buruk, penanganan autisme serta pelayanan kesehatan untuk lansia.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI merevitalisasi fungsi puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat terdepan yang komprehensif serta posyandu dan menertibkan iklan kesehatan yang menyesatkan.
10. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dan merealisasikan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.
11. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk memaksimalkan penyerapan anggaran antara lain dengan memprioritaskan bantuan bagi masalah kesehatan di daerah bencana.
12. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar ada terobosan sehingga dokter di daerah mudah mengikuti program pendidikan dokter secara lebih merata dan menjadi dokter spesialis tanpa harus terbentur dengan peraturan Kolegium.
13. Komisi IX DPR RI mendesak diadakannya rapat gabungan dengan Diknas untuk memasukkan materi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kedalam kurikulum.

14. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI menginventarisasi kendala-kendala di lapangan ketika melakukan Renstra dan bila kendala ini terkait dengan anggaran maka Panitia Anggaran akan memperjuangkan anggaran tersebut.

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Jakarta, 10 November 2009

Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Ketua,



Dr. Ribka Tjiptaning